

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku budaya, etnis, agama dan golongan. Keanekaragaman ini disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah suatu bangsa yang mencerminkan jati diri bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya budaya yang berbeda-beda dari berbagai macam etnis suku bangsa, agama, ras dan antar golongan masyarakat namun tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi di satu sisi lain dari keberagaman suku bangsa, agama, ras dan antar golongan ini sebenarnya menyimpan satu potensi konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena dari keberagaman ini dapat memicu suatu konflik yang melibatkan perpecahan atau kerusuhan massal antar etnis suku bangsa, antar agama, ras dan antar golongan (SARA). Sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Najwan (2009: 196) dari keanekaragaman budaya, etnis, agama dan multi golongan ini dari satu sisi secara teori multi budaya merupakan potensi budaya yang dapat mencerminkan jati diri bangsa yang besar, akan tetapi dari sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa karena konflik antar budaya dapat menimbulkan pertikaian antar etnis, antar agama, ras dan antar golongan (SARA) yang bersifat *sensitive* dan rapuh yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa Indonesia.

Konflik pertikaian berlatar belakang SARA dan menjurus ke arah disintegrasi bangsa ini banyak sekali terjadi setelah pada tahun 1998 yaitu, ketika Indonesia memasuki era Reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami *euforia* kebebasan dalam berpolitik, pola pemerintahan yang lebih demokratis dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah).

Adanya efek *euforia* yang berlebihan akan kebebasan politik, demokrasi dan otonomi daerah tersebut sebenarnya menimbulkan permasalahan baru karena jadi menimbulkan datangnya hasrat persaingan di tingkat elit politik lokal daerah, untuk saling bersaing dan berkonflik mendapatkan jabatan guna mencapai kepentingan politik di daerahnya. Di sini para elit politik dalam mencapai kepentingan politiknya tersebut melakukannya dengan cara memobilisasi massa melalui isu sensitif yaitu isu etnis dan agama. Sehingga konflik komunal pun dapat dengan mudah terjadi melalui peran elit politik yang ikut membawa dan melibatkan perseteruan konflik antar etnis dan agama sehingga membahayakan integrasi bangsa Indonesia.

Menurut Hasrullah (2009: 5), fakta politik menunjukkan bahwa pada saat nuansa dan *euforia* demokrasi ketika awal reformasi terbuka lebar di Indonesia, maka konflik di beberapa belahan daerah di Indonesia bermunculan. Konflik tersebut diantaranya, konflik komunal yang terjadi di Poso tahun 1998 dan di Maluku tahun 1999 yang melibatkan konflik agama antara agama Islam dengan Kristen. Konflik antar etnis di Kalimantan pada tahun 1998 antara etnis dayak dengan etnis Madura. Munculnya kembali gerakan separatis di Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan di wilayah Papua melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1998 yang ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Kemudian disintegrasikan di wilayah Timor Timur yang akhirnya memisahkan diri dari wilayah Indonesia melalui referendum pada tahun 1999.

Konflik dan permasalahan pada era akhir Orde Baru seperti apa yang di katakan Hasrullah (2009:5) itu, pada umumnya dilatarbelakangi karena faktor struktural yaitu, dari adanya marjinalisasi dan kesenjangan dibidang sosial, politik dan ekonomi antara pemerintah pusat atau orang-orang terdekat Presiden Soeharto dengan pemerintah daerah dan rakyat biasa Indonesia. Sehingga dari hal itu rakyat mengalami ketidakpuasan sosial dan menyebabkan konflik pertikaan yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih dalam terhadap salah satu konflik yang terjadi setelah berakhirnya Orde Baru. Adapun konflik yang dijadikan penelitian oleh peneliti adalah konflik Poso yang terjadi pada tahun 1998-2001.

Poso merupakan suatu wilayah Kabupaten dari Provinsi Sulawesi Tengah, nama Poso ini pun menjadi sekaligus ibu kota kabupaten ini. Kabupaten Poso secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan, yang terdiri dari 23 kelurahan dan 133 desa, dengan total jumlah penduduk 209.228 jiwa (BPS Sulawesi Tengah 2011: 94, 96). Data Sulawesi Tengah dalam angka tahun 2006 yang dikutip Hendrajaya *et al.* (2010: 19), untuk penganut agama di Poso relatif seimbang dalam hal penganut agama dengan 45 persen penduduk beragama Islam, 35 persen beragama Kristen, sedangkan sisanya penganut Buddha, Hindu dan lainnya. Umumnya agama Islam dipeluk warga pendatang dari Jawa, Lombok, Gorontalo, Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar), serta penduduk asli Tojo, Bungku dan Togian. Sedangkan Penduduk beragama Kristen berjumlah umumnya penduduk asli dari suku Pamona, Mori, serta pendatang dari Manado, Toraja dan Nusa Tenggara Timur (Karnavian, 2008: 5).

Berdasarkan data penduduk wilayah Poso itu dapat dikatakan wilayah ini sebagai miniatur Indonesia yang memiliki keberagaman multikultural terdiri dari berbagai macam etnis dan agama. Kemudian dari keberagaman multikultural ini tentu menyimpan potensi konflik dan perpecahan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di wilayah Poso antara berbagai macam etnis dan agama yang ada di Poso.

Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* ini, kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen ini, mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998-2001. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan dan latar belakang, tanpa terkecuali, terseret, dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan (Gogali, 2009: 21). Perlu diingat bahwa posisi rakyat di sini

hanyalah korban dan tidak tahu apa-apa mengenai konflik yang terjadi, sebagian pun terpaksa terlibat untuk sekedar bertahan atau untuk menyerang demi mempertahankan kehidupan mereka. Berdasarkan pernyataan dari Gogali (2009) inilah membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji permasalahan di Poso kenapa sampai terjadi dan kenapa rakyat menjadi mudah terlibat dalam konflik sosial ini.

Konflik horizontal memang menjadi wacana utama jika dilihat dan didengar melalui berita di media massa sekilas, hal ini dikatakan bila dilihat dari pertikaian yang melibatkan antar etnis dan agama di Poso yaitu antara agama Islam dan Kristen. Namun faktanya ada beberapa hal yang masih menjadi misteri dan ada banyak hal-hal lain yang belum terungkap dari peristiwa ini, diantaranya mengenai faktor apakah sebenarnya penyebab konflik di Poso dan kenapa konflik Poso ini bisa terjadi secara berlarut-larut dan berkepanjangan.

Beberapa penelitian tentang Konflik Poso menunjukkan (Hasrullah; 2009, Klinken; 2007, Aragon; 2007) bahwa, konflik yang terjadi di wilayah Poso karena konflik antar elit politik yang dimana para elit politik daerah ini memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politiknya yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi massa melalui hasutan isu sensitif agama dan etnis. Berdasarkan pernyataan dari hasil penelitian yang diungkapkan di atas membuat peneliti ingin mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Poso, apakah benar latar belakangnya karena konflik antar elit politik atau apakah ada faktor-faktor lainnya yang menjadi akar konflik permasalahan di Poso. Menurut peneliti konflik di Poso ini masih menyimpan berbagai macam kejanggalan dan misteri untuk diungkapkan, salah satunya mengenai kenapa konflik agamalah yang dijadikan isu utama dalam konflik Poso .

Untuk proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah, di sini ada hal yang membuat peneliti bertanda tanya besar karena proses penyelesaian konflik di Poso kenapa sampai terjadi secara berlarut-larut dan berkepanjangan. Terhitung awal konflik di Poso terjadi pada tahun 1998 kemudian berakhir pada tahun 2001. Hal ini terjadi apakah karena ada pengaruhnya dari cara perbedaan

pengelolaan konflik antara pada masa Orde Baru dan Reformasi. Menurut Hasrullah (2009) dan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2011), selama Orde Baru yang otoriter pengelolaan konflik ditekan secara sistematis melalui kontrol militer dapat berperan meredam ketidakpuasan sosial dan konflik pun tidak dipublikasikan karena ditakutkan akan memicu sentiment etnis, agama dan ras. Kemudian berbeda pada masa Reformasi yang dimana peran militer dikurangi dan lebih meningkatkan peran masyarakat sipil dalam proses penciptaan perdamaian.

Adanya perbedaan cara penanganan dan pengelolaan konflik antara Orde Baru dan Reformasi di sini jelas sekali berbeda dan tentunya akan berdampak sesuatu yang berbeda pula ketika konflik berakhir. Melihat hal ini maka peneliti di sini merasa perlu dilakukannya penelitian lebih dalam untuk mengungkapkan tentang konflik komunal yang terjadi di Poso ini dan diharapkan melalui penelitian ini bisa menganalisis peranan pemerintah maupun militer dalam proses penanganan konflik tersebut. Sehingga bisa ditemukan jawaban kenapa konflik di Poso bisa terjadi secara berkepanjangan dan dapat mengungkapkan dampak konflik Poso terhadap keutuhan Negara kesatuan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Konflik yang terjadi di Poso mengingatkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, sesungguhnya masih merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan nasional. Kemudian menurut peneliti peristiwa konflik poso yang terjadi pada tahun 1998-2001 adalah peristiwa berskala nasional yang penting untuk jadi fokus perhatian, agar peristiwa konflik perpecahan yang melibatkan unsur suku bangsa, ras, agama dan antar golongan (SARA) tidak terjadi dan terulang lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi hal yang berbau SARA ini jangan sampai di manfaatkan oleh segolongan elit politik tertentu untuk mencapai kepentingannya. Kemudian melalui penelitian ini peneliti ingin sekaligus menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah konflik sosial dan integrasi nasional bangsa Indonesia yang pada hakikatnya permasalahan perpecahan ini akan terus

senantiasa melekat pada kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk pengkajian skripsi ini tidak pada sudut pandang perspektif sejarah saja akan tetapi dengan pendekatan dan sudut pandang ilmu sosial lainnya guna pengkajian secara tajam dan komprehensif, diantaranya yaitu ilmu sosiologi dengan pendekatan melalui teori konflik menurut Coser (Paloma, 1994: 108), yang mengemukakan bahwa konflik dapat bersifat positif dengan membantu mempertahankan struktur sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Salah satu fungsi tersebut adalah Konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Maksudnya adalah masyarakat yang sedang mengalami disintegrasi ataupun berkonflik dengan masyarakat lain atau lawan konfliknya, di sini konflik dapat berperan sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat atau memperbaiki kepaduan dan integrasi. Contohnya di Poso ketika konflik agama berlangsung konflik membantu kepaduan masyarakat yang beragama Islam ataupun Kristen yang masing-masing masyarakat agamanya menjadi ikut berperan dan menjadi bersatu dengan dalih isu *sensitive* persaudaraan agama.

Merujuk dari beberapa hal yang telah di paparkan diatas menjadi ketertarikan peneliti sehingga dijadikanlah ide dasar dari penelitian skripsi ini. Dalam skripsi ini peneliti mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik Poso pada tahun 1998-2001 sebagai bahan penelitian skripsi peneliti di Universitas Pendidikan Indonesia khususnya di Jurusan Pendidikan Sejarah dengan mengkaji permasalahan secara historis dan mengkait permasalahan dari periode masa akhir Orde Baru sampai dengan era Reformasi. Maka diangkatlah penulisan skripsi ini dengan judul “ *Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)*”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, dalam skripsi ini terdapat permasalahan utama yang menjadi keresahan peneliti yaitu, mengapa terjadi konflik berkepanjangan antara penduduk agama Islam dengan Kristen di Poso?

Permasalahan tersebut dikembangkan menjadi empat pertanyaan rumusan masalah yaitu:

1. Apa yang menjadi penyebab akar masalah terjadinya konflik di Poso?
2. Bagaimana dinamika terjadinya konflik di Poso tahun 1998-2001?
3. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik di Poso?
4. Bagaimana dampak konflik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Poso?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telah dibahas pada poin sebelumnya, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab akar masalah terjadinya konflik di Poso.
2. Memaparkan dinamika terjadinya konflik Poso tahun 1998-2001.
3. Menganalisis peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik Poso.
4. Mengungkapkan dampak konflik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Poso.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Memperkaya penulisan di Jurusan Pendidikan Sejarah, terutama sejarah Indonesia.
2. Untuk menambah pengetahuan peneliti serta para pembaca mengenai kondisi daerah di Poso tahun 1998-2001 ditinjau dalam kondisi politik, sosial, ekonomi dan Agama.
3. Menambah pengayaan materi dalam KIKD di kelas XII semester dua dengan Kompetensi Dasar: 4.7. Mengolah informasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk tulisan, juga di kelas XII semester dua pada mata pelajaran

peminatan IPS bidang studi sejarah dengan Kompetensi Dasar: 4.5. Merekonstruksi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode historis digunakan menurut Abdurahman (2007: 63), karena dilihat dari tujuan penelitian sejarah sendiri adalah mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau. Metode historis menurut Abdurahman (2007: 53), adalah “penyelidikan atas suatu masalah dalam mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis”. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk memperjelas penelitian ini perlu didukung oleh metode sejarah yang merupakan suatu metode yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah.

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana yang dijelaskan dalam buku karya Abdurahman (2007: 54-80) adalah sebagai berikut:

1. Teknik pemilihan topik dan penyusunan rencana penelitian
2. Heuristik yaitu teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber Sejarah tersebut dapat berupa buku-buku, koran, majalah, arsip, dokumen dan juga wawancara terhadap pelaku peristiwa atau saksi mata.
3. Kritik yaitu teknik untuk menguji keabsahan tentang keaslian sumber (autentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.
4. Interpretasi bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh menurut Berkhofer, dikutip Alfian, 1994 dalam (Abdurahman 2007: 73).

5. Historiografi merupakan fase terakhir dalam metode sejarah. Dalam Historiografi ini dilakukan penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai metode serta teknik yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam bab tersendiri yaitu, di Bab III.

1.6. Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi penulisan skripsi sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI (2013: 18-34) yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang konflik sosial dan agama di Poso sehingga menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitiannya. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan agar tidak melebar maka dicantumkan identifikasi dan perumusan masalah sehingga permasalahan dapat dikaji dalam penulisan skripsi. Akan dipaparkan pula tentang tujuan penelitian ini dan juga akan dipaparkan mengenai manfaat penelitian skripsi ini, selanjutnya dari bab ini akan dimuat tentang metode dan teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis dan terakhir mengenai struktur organisasi skripsi yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis, memaparkan mengenai teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti. Akan dijelaskan pula tentang penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang sebelumnya pada buku yang telah membahas tentang konflik di Poso ini.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab mengenai kegiatan-kegiatan dan cara-cara yang dilakukan dalam penelitian skripsi. Metode yang digunakan tentu adalah metode penelitian sejarah, di mana langkah-langkahnya terbagi menjadi heuristik atau pengumpulan sumber, kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan, interpretasi sumber, hingga ke tahap penulisan atau historiografi dan didukung pula dengan teknik penelitian dengan studi literatur.

Bab IV Pembahasan, di dalamnya penulis akan mendeskripsikan mengenai Poso dalam konflik tahun 1998-2001. Dalam bab ini pembahasan dibagi ke dalam

beberapa sub-bab yang pertama mendeskripsikan situasi kondisi di Poso sebelum terjadinya konflik pada tahun 1998, menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya konflik di Poso, memaparkan jalan terjadinya konflik Poso tahun 1998-2001, menganalisis peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan terakhir mengungkapkan dampak konflik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Poso pasca konflik.

Bab V Kesimpulan, dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil-hasil temuan peneliti tentang permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini. Serta rekomendasi apa yang bisa diterapkan dari hasil penelitian ini terhadap pengembangan materi ajar sejarah di sekolah sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).